PROPOSAL ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Diajukan memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis

Diampu oleh :

Retno Sari Dewi, SH,M.H

Disusun oleh :

1. AVIF ENDAH VALUPI NPM 18.60302.100056
2. NOVI AGILIAWATI NPM 18.60302.100060
3. RIMA INDRIANA S.P NPM 18.60302.100089
4. WINDARI NPM 18.60302.100061
5. REIVAL RESKI C.W NPM 18.60302.100094

FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

APRIL 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	2
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 DESKRIPSI PERSERO	3
2.2 CIRI-CIRI PERSERO.....	3
2.3 SYARAT PENDIRIAN PERSERO	3
BAB III PEMBAHASAN.....	4
3.1 PELAKSANAAN PENDIRIAN DAN PERMODALAN PERSEROAN .	4
3.2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....	6
3.3 PENGURUS PERSEROAN SERTA TUGAS DAN WEWENANG	7
BAB IV PENUTUP	10
4.1 KESIMPULAN.....	10
4.2 SARAN.....	10

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini.

Penyusunan karya tulis ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu bidang pelajaran yaitu Aspek Hukum Dalam Bisnis.

Dalam penulisan dan penelitian karya tulis ini tidak sedikit kesulitan penulis hadapi. Oleh karena itu penulis menyadari sedalam-dalamnya, bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Retno Sari Dewi, SH,M.H, selaku dosen Aspek Hukum Dalam Bisnis,
2. Orang tua saya yang selalu memberikan motivasi dan do'a dalam setiap langkah kehidupan,
3. Teman-teman se-kelompok yang sudah membantu menyelesaikan tugas ini.

Harapan penulis, semoga karya tulis ini dapat memenuhi tuntunan, harapan, dan kebutuhan bagi para pembaca. Terutama pula dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Tulungagung, April 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004, maksud dan tujuan pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PT PPA”) adalah untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Jangka waktu berdirinya Perseroan sesuai Anggaran Dasar PT PPA No. 7 tanggal 27 Februari 2004 adalah lima tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Tanggal 4 September 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Menindaklanjuti PP No. 61 tersebut, Pemegang Saham mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA No. KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah:

1. Tujuan utamanya mencari laba (Komersial).
2. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham.
3. Dipimpin oleh direksi.
4. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta.

5. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero).
6. Tidak memperoleh fasilitas Negara.

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3. PT Garuda Indonesia (Persero)
4. PT Angkasa Pura (Persero)
5. PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero)
6. PT Tambang Bukit Asam (Persero)
7. PT Aneka Tambang (Persero)
8. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
9. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
10. PT Pos Indonesia (Persero)
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
12. PT Adhi Karya (Persero)
13. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
14. PT Perusahaan Perumahan (Persero)
15. PT Waskitha Karya (Persero)
16. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pendirian dan permodalan perseroan?
2. Terdiri dari apa saja pengurus perseroan (organ) dan bagaimana tugas dan wewenang?
3. Bagaimana cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris pada perseroan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penulisan :
Untuk melengkapi tugas mata kuliah hukum Perusahaan di fakultas hukum universitas tanjungpura.

2. Manfaat Penulisan :

- a. Agar penulis dan mahasiswa lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan pendirian perseroan khususnya yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang pengurus dalam organ perseroan dan cara pengangkatan serta pemberhentiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFINISI PERSERO

BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

2.2 CIRI-CIRI PERSERO

Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut:

1. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan
3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
4. Modalnya berbentuk saham
5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
6. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
7. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
8. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
9. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
10. Dipimpin oleh direksi
11. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
12. Tidak mendapat fasilitas Negara

13. Tujuan utama memperoleh keuntungan
14. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

2.3 SYARAT PENDIRIAN PERSERO

1. Pendiri Perseroan
2. Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini :
 - ✓ Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
 - ✓ Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
 - ✓ Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan.
 - ✓ Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota
 - ✓ Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 PELAKSANAAN PENDIRIAN DAN PERMODALAN PERSEROAN

1. Pelaksanaan Pendirian Perseroan

Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang BUMN dan ketentuan UU tentang PT, maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- ✓ Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
- ✓ Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pendiri Perseroan harus :

- a. Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;
- b. Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
- c. Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
- d. Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan.
- e. Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota
- f. Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

2. Permodalan Perseroan

- ✓ Besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan, modal disetor serta siapa saja yang menjadi Pemegang saham dan berapa jumlahnya seperti dibawah ini;
- ✓ Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu di Indonesia.

Dari modal dasar tersebut minimal 25% (dua puluh lima) persen atau sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh pada saat akan mengajukan permohonan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. Untuk menentukan besarnya modal

dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan.

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.

Pemegang saham untuk pertama kali adalah Pendiri Perseroan jumlahnya minimal 2 (dua) orang, jadi anda tentukan sendiri berapa jumlah modal yang ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan.

A. Modal Dasar (authorized capital)

Modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham, ketentuan ini tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nominal.

Modal dasar merupakan jumlah maximum saham yang dapat diterbitkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Untuk merubah modal dasar, harus merubah anggaran dasar berdasarkan RUPS-Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap perubahan modal dasar harus mendapatkan persetujuan dari Menteri

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya Modal Perseroan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar diatas.

B. Modal Disetor (paid up capital)

Adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham. Bilamana seluruh Modal ditempatkan telah disetor seluruhnya oleh para pemegang sahamnya, maka biasanya dinyatakan

sebagai Modal ditempatkan dan disetor penuh (subscribed and paid in capital).

Penyetoran Modal Perseroan :

1. Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan.
2. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
3. Dalam hal penyetoran modal dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

C. Modal Ditempatkan (Subscribe Capital)

Adalah sebahagian modal dari modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya didalam akta pendirian atau perubahannya, sebagai pemegang saham.

3.2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- ✓ RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang selanjutnya disebut RUPS adalah: organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- ✓ Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) :
 - a. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara.
 - b. Menteri bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
 - c. Menteri dpt memberikan kuasa utk mewakilinya dlm RUPS dengan hak substitusi kepada: perorangan atau badan hukum.

- d. Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri selaku pemegang saham, maka setiap keputusan tertulis Menteri yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan Keputusan RUPS.
- e. Bagi Persero dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100%, Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.
- ✓ Hal-Hal Tertentu Yang Wajib Bagi Pemegang Kuasa Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan Menteri Untuk Mengambil Keputusan Dalam Rups Antara Lain Mengenai:
 - 1. Perubahan jumlah modal.
 - 2. Perubahan Anggaran Dasar.
 - 3. Rencana penggunaan laba.
 - 4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero.
 - 5. Investasi dan pembiayaan jangka panjang.
 - 6. Kerja sama Persero.
 - 7. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.
 - 8. Pengalihan aktiva.

3.3 PENGURUS PERSEROAN SERTA TUGAS DAN WEWENANGNYA

Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Komisaris. Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris. Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama.

Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat seseorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.

1. Direksi Persero:

a. Pengertian Direksi:

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN di dlm maupun di luar pengadilan.

b. Pengangkatan Direksi:

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh :

✓ RUPS.

✓ Menteri (dalam hal menteri bertindak selaku RUPS)

Persyaratan & tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

c. Seleksi calon anggota Direksi:

Seleksi dilakukan melalui:

✓ Uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

✓ Oleh suatu tim yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan

Pertimbangan dalam seleksi tersebut adalah untuk mendapatkan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

d. Kewajiban anggota Direksi:

✓ Wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perseroan.

✓ Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang 5 tahun yang ditandatangani bersama dengan komisaris dan mendapat pengesahan RUPS.

✓ Menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang yang disahkan RUPS.

- ✓ Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan, 5 bulan setelah tahun buku persero ditutup.
 - ✓ Wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan perseroan.
- e. Larangan bagi anggota Direksi memegang jabatan rangkap sebagai:
- ✓ Anggota Direksi pd BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - ✓ Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau.
 - ✓ Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masa jabatan anggota Direksi:
- ✓ Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali Untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - ✓ Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- g. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu dilakukan apabila kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan :
- ✓ Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - ✓ Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 - ✓ Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Dinyatakan bersalah dgn keputusan pengadilan yg memp kekuatan hk tetap.
 - ✓ Terlibat tindakan yg merugikan BUMN dan/ atau Negara.
 - ✓ Mengundurkan diri.
- h. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- ✓ Meninggal dunia.
 - ✓ Masa jabatannya berakhir.
 - ✓ Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri, dan/atau.

- ✓ Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah no 45 th 2005 & peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Komisaris Persero

a. Pengertian Komisaris:

Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

b. Pengangkatan Komisaris:

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh :

- ✓ RUPS
- ✓ Menteri (dalam hal menteri bertindak selaku RUPS)
- ✓ Persyaratan & tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.

c. Pengangkatan anggota Komisaris berdasarkan pertimbangan:

- ✓ Untuk mendapatkan anggota komisaris yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan persero.
- ✓ Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- ✓ Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut.
- ✓ Serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

d. Tugas Komisaris:

- ✓ Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- ✓ Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- ✓ Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

- e. Larangan bagi anggota Komisaris memegang jabatan rangkap sebagai:
 - ✓ Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - ✓ Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan masa jabatan Komisaris:
 - ✓ Masa jabatan Komisaris adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
 - ✓ Ketentuan tentang pemberhentian sewaktu-waktu terhadap anggota Komisaris sama dengan ketentuan tentang Direksi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan yang diusulkan oleh Menteri (Menteri BUMN) usulan dikaji bersama Menteri teknis & Menteri keuangan dengan dasar pertimbangan. Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan yang dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

4.2 SARAN

Persero yang merupakan BUMN jangan semata-mata hanya mencari keuntungan atau laba saja, di samping untuk memperoleh keuntungan Persero yang merupakan BUMN harus lebih mengutamakan kepentingan khalayak ramai yang bersifat sosial, sehingga tidak terlalu memberatkan rakyat yang menggunakan barang/jasa yang disediakan oleh Persero yang merupakan BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data :

<https://www.netheri.net/2016/07/contoh-makalah-ekonomi-tentang-Perusahaan-Perseorangan2.html?m=1>